

Model Sistem Responsibilitas Dan Akuntabilitas “Gapura Kota Model”

by Sri Juni Woro Astuti

Submission date: 10-Apr-2023 03:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2060402389

File name: MODEL_GAPURA_KOTA_-_Sri_Juni_Woro_Astuti.docx (343.28K)

Word count: 2261

Character count: 15638

MODEL SISTEM RESPONSIBILITAS DAN
AKUNTABILITAS
“GAPURA KOTA MODEL”



Oleh
Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.
Supriyanto, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2013

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001, seharusnya sudah banyak menghasilkan perubahan khususnya terkait dengan penyediaan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomi, baik pelayanan yang bersifat *regulative* maupun penyediaan *public goods*. Namun sejauh ini masih banyak masalah urgen yang justru terbelakal seperti masih rendahnya pemenuhan terhadap kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Kondisi tersebut antara lain tercermin dalam kajian terhadap pelayanan pendidikan yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh pola penyimpangan yang terjadi, yakni pengucuran dana tidak sesuai kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan, penyimpangan cara penyaluran, potongan tidak wajar, belanja tidak sesuai peruntukan, pengurangan hasil, serta kebocoran dalam alokasi, penggunaan dan audit dana. Fakta yang menunjukkan masih rendahnya tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain adanya kasus Robohnya atap Sekolah Dasar Negeri 02 Kwitang, Jakarta Pusat yang menimpa tiga siswa dan satu penjaga kantin pada Selasa 24 Mei 2011 lalu (Yappika, 2011). Kemudian kasus lain pada Juli 2010 seorang warga Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe mengaku dikeluarkan dari Rumah Sakit PMI di Lhokseumawe karena keluarganya mempertanyakan mengapa dirinya yang memiliki kartu Jamkesmas harus membeli obat menggunakan resep dokter (Yappika, 2011), dan masih banyak lagi kasus cerminan rendahnya pelayanan public. Kasus-kasus yang muncul tersebut hanyalah permukaan gunung es yang tampak dari fundamen buruknya system dan budaya layanan public di Indonesia.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Suharyo di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, menunjukkan bahwa kualitas birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang pada era otonomi daerah belum memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna layanan (<http://pasca.ugm.ac.id>, 2011). Demikian pula studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian FEUI terhadap lebih dari 2.000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan adalah masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik. Berdasarkan penelitian tersebut, masalah utama pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi hambatan investasi adalah: masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan peraturan daerah (perda) yang tidak pro-bisnis. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi (<http://duniakontraktor.com/>, 2011).

Pada 1 November 2010 KPK mempublikasikan hasil survei intergitas layanan publik. Survei tersebut melibatkan 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota, dengan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota dalam satu tahun terakhir. Survei berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi.

Rendahnya kualitas pelayanan publik ini disebabkan rendahnya moral dan etika aparatur dalam pemberian pelayanan publik sehingga perilaku korup masih tetap dipertahankan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain karena belum *'terinstall-nya'* sistem responsibilitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah daerah. Sulitnya meng-*install* sistem responsibilitas dan akuntabilitas ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, masih kuatnya budaya patronase di lingkungan birokrasi pemerintah daerah, dan kontrol masyarakat yang relatif masih rendah. Kondisi demikian lebih diperparah lagi dengan adanya ketidakjelasan wewenang yang dimiliki aparat birokrasi. Dalam tatanan organisasi, wewenang seharusnya hanya diberikan pada porsi yang relatif terbatas sesuai dengan cakupan tugas seorang pegawai. Namun dalam praktiknya, wewenang yang terbatas itu seringkali diintervensi oleh pihak pemberi wewenang, dalam hirarki birokrasi yang lebih tinggi atau oleh pejabat politik.

Dalam situasi demikian, maka aparat birokrasi, akan lebih tunduk kepada pejabat pada hirarki di atasnya atau yang lebih tinggi, terlebih lagi kepada pejabat politik. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana mengharapkan sebuah birokrasi yang netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mampukah aparat birokrasi melaksanakan tugasnya secara akuntabel?. Perilaku dan orientasi tindakan yang secara riil dilaksanakan oleh para pejabat dan staf di lingkungan birokrasi pemerintah daerah seringkali tidak sesuai dengan ketentuan formal dan nilai-nilai etika pemerintahan yang seharusnya dipegang teguh (Henry,1995; Frederickson,1997; Thompson, 2004).

Pentingnya dimensi etika bahkan dapat dianalogikan dengan sistem sensor pada administrasi publik dan dapat mempengaruhi dimensi-dimensi lain dalam sistem administrasi publik (Keban, 2008). Namun nilai-nilai normatif tersebut semakin memudar sehingga semakin banyak penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang birokrasi dan pejabat-pejabat politik sebagai pengambil kebijakan yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Hal ini mencerminkan belum bekerjanya sistem

akuntabilitas birokrasi sehingga mekanisme kontrol yang dijalankan tidak efektif dalam mengarahkan perilaku birokrasi agar selalu bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

5 Untuk itu perlu dilakukan upaya yang sistematis dalam rangka revitalisasi sistem responsibilitas (pertanggungjawaban internal) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban eksternal) pemerintah daerah. mengapa diperlukan revitalisasi sistem responsibilitas dan akuntabilitas? karena responsibilitas dan akuntabilitas diyakini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di bidang pendidikan. Tanpa akuntabilitas publik, prakarsa dan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan daerah sulit dibangun. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah, masing-masing institusi harus dapat membangun akuntabilitas peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model sistem responsibilitas dan akuntabilitas birokrasi yang dapat berjalan dengan efektif khususnya dalam pelayanan public.

B. MODEL

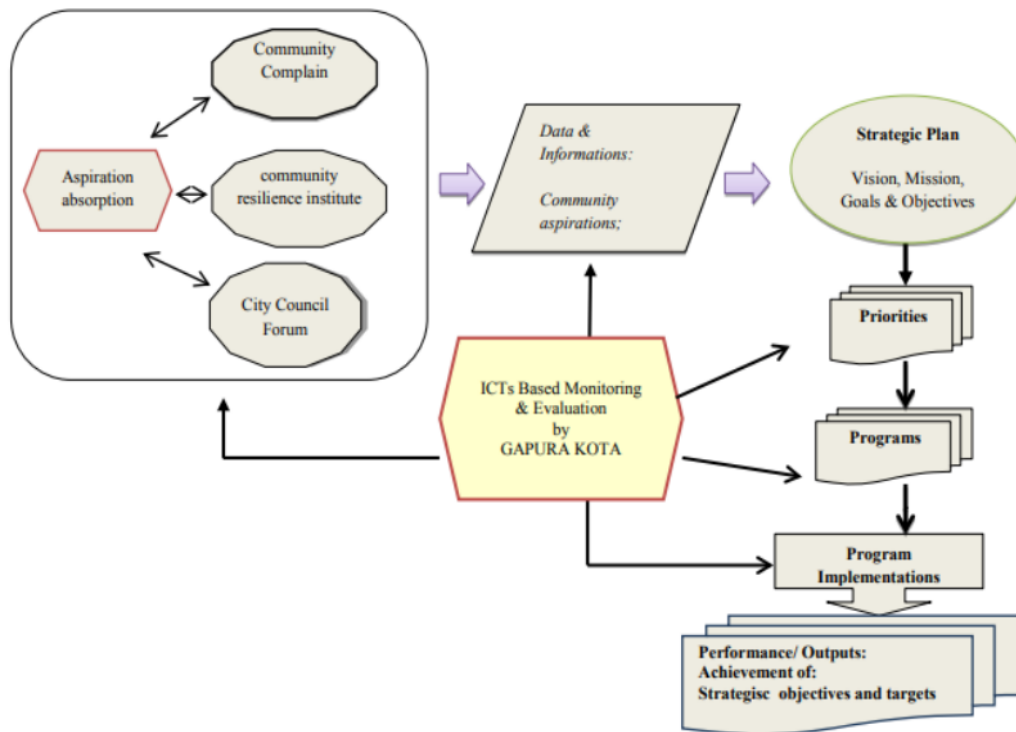
Akuntabilitas sebagai suatu metode untuk menjaga agar publik mendapatkan informasi dan kekuasaan mendapatkan kontrol, seperti dikemukakan Richard Mulgan (2006), belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan belum ditegakkannya pilar utama akuntabilitas yakni transparansi (*transparency*). Komitmen menjalankan *good government* masih menjadi wacana di atas kertas belaka, namun realitas menunjukkan kasus-kasus korupsi semakin marak di Indonesia. Demokrasi dan desentralisasi yang seharusnya diiringi dengan akuntabilitas dan tanggungjawab yang semakin besar justru yang terjadi adalah demokrasi dan desentralisasi korupsi (Kumorotomo, 2005).

Sistem akuntabilitas publik meliputi serangkaian tahapan yang dimulai dari penyusunan perencanaan strategis pembangunan dimana rencana strategis tersebut harus dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan ukuran capaian keberhasilan yang juga jelas dan terukur. Ada dua hal yang utama perlu diperhatikan untuk merevitalisasi sistem akuntabilitas publik di Indonesia, *pertama* perlunya pembangunan kapasitas perencanaan strategis dan *kedua* pengefektifan evaluasi dan monitoring kinerja.

Konsep perencanaan strategik itu sendiri sebenarnya diadopsi dari praktek manajemen sektor privat, yang kemudian menjadi salah satu fokus dari paradigma *new public manajemen* (NPM) yang lebih mementingkan output. Meskipun popularitas konsep NPM sudah mulai surut dan tidak populer lagi untuk Negara-negara maju (Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., and Tinkler, J., 2006), namun untuk konteks di Indonesia masih cukup relevan terutama untuk memperbaiki kualitas manajemen birokrasi

pemerintahan sehingga mampu bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif. Aplikasi manajemen strategis menuntut adanya perencanaan yang integratif dan kolaboratif melibatkan seluruh elemen dalam proses manajemen pemerintahan melalui pendekatan yang koheren untuk mencapai agenda-agenda strategis yang ditetapkan tersebut (Poister, Theodore H. and Gregory D. Streib, 1999).

Masalah utama terletak pada perbedaan atau ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan kebutuhan lokal, dengan rencana strategis dan prioritas pembangunan yang dirumuskan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut terus terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Dengan demikian perlu untuk merevitalisasi fungsi lembaga yang memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan efektif. Terutama untuk memastikan relevansi atau sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat setempat dengan program pengembangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk mereformulasikan sistem responsibilitas dan akuntabilitas dalam manajemen pembangunan daerah. Berikut adalah visualisasi Model Gapura Kota:



Gambar 1: Model Gapura Kota

C. KETERANGAN MODEL

Model ini bermaksud untuk menekankan fungsi sinkronisasi sekaligus evaluasi dan monitoring apakah aspirasi yang disampaikan pada proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan realisasi program-program pembangunan telah selaras. Model ini dinamai ' MODEL GAPURA KOTA'. Untuk dapat melakukan fungsinya secara efektif, Model "Gapura Kota" ini sangat membutuhkan dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam rangka membangun sistem yang terintegrasi guna mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah secara berkelanjutan, model Gapura Kota ini diperkenalkan sebagai salah satu solusi. Model ini berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan juga mengadopsi konsep e-government, yang diambil dari sektor bisnis (swasta) guna meningkatkan kualitas pelayanan public secara electronic atau digital (Srivastava and Thompson, 2010). Konsep-konsep e-Government dapat disimpulkan sebagai penerapan alat elektronik dalam dua aspek, yaitu: (1) interaksi antara pemerintah dan masyarakat (warga negara) dan pemerintah dan pengusaha (bisnis), dan (2) kegiatan operasional internal pemerintah. Adapun Interaksi melalui media elektronik ini lebih untuk memfasilitasi dan mendorong penciptaan dan implementasi demokratisasi dan pemerintahan yang baik (Backus, 2001).

Terkait dengan kapasitas perencanaan pembangunan daerah, penggunaan TIK sangat diperlukan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat dan cepat sehingga dapat mensupport pengambilan keputusan yang akurat dan cepat pula. Terlebih lagi untuk meningkatkan efektivitas fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dukungan TIK sangat diperlukan untuk memperlancar proses pengolahan data dan informasi serta pendokumentasiannya.

Sebagaimana visualisasi model pada gambar 1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gapura Kota menjadi center (pusat) yang menampung, memproses data dan informasi serta mendokumentasikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui berbagai media dan mekanisme yang ada kemudian diolah dan menjadi masukan untuk penyusunan rencana strategis.
2. Dalam rencana strategis tersebut akan muncul isu-isu strategis serta prioritas pembangunan sebagai solusi atas isu-isu strategis tersebut. Dari prioritas kemudian dirumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun. Dalam tahap ini peran Gapura Kota diperlukan untuk menjamin sinkronisasi proses

penganggaran dengan prioritas program agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Tahap selanjutnya adalah implementasi program. Dalam tahap ini peran Gapura Kota diperlukan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan agar tetap konsisten dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Terakhir adalah Evaluasi hasil kinerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mencatat pencapaian hasil-hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan target dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pembangunan perlu dilakukan secara cermat dan detail dengan dukungan data dan dokumentasi yang terekam oleh Sistem Gapura Kota.

GAPURA KOTA adalah singkatan dari :

G : Gerakan
A : Anggaran
P : Pembangunan
U : Untuk
RA : Rakyat

K : Kualitas
O : Optimal
T : Transparan
A : Akuntabel

D. MANFAAT MODEL

Dengan dikembangkannya model ini tidak saja memberi kontribusi teoritis khususnya dalam khasanah pengembangan ilmu Administrasi Publik dan manajemen sektor publik. Namun diharapkan juga memberikan kontribusi praktis dalam rangka peningkatan akuntabilitas aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan yang pada gilirannya akan dapat menekan tingkat kolusi dan korupsi di lingkungan organisasi pemerintahan di Indonesia. Desain atau model pengembangan sistem responsibilitas dan akuntabilitas ini dibangun berdasarkan perpaduan antara karakteristik birokrasi yang bekerja secara sistematis, efisien, dan professional dan karakteristik tata kelola pemerintahan (*governance*) pada sistem pemerintahan demokrasi. Dengan demikian luaran ini menjadi sangat penting bagi percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme aparat yang sudah bergulir sejak tahun 2001 namun belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA:

- Beck JÃfÃrgensen, T. & Larsen, B. 1987. Control - An Attempt at Forming a Theory. *Scandinavian Political Studies*, 10 (4), 279-299.
- Blind, Peride K., *Accountability in Public Service Delivery: A Multidisciplinary Review of the Concept*, Paper Prepared for the Expert Group Meeting *Engaging Citizens to Enhance Public Sector Accountability and Prevent Corruption in the Delivery of Public Services* Vienna, Austria, 7-8 and 11-13 July 2011
- Bovens, M. 2005. Public Accountability. In *The Oxford Handbook of Public Management*; Ferlie E., Lynne L., Pollitt C., Eds.; Oxford University Press: Oxford.
- Caldwell, Adam. 1998. Bureaucratic Accountability: A Look at Utah's Redevelopment Agencies. *Hinckley Journal of Politics*. Autumn. Vol.1.No.1.pp.27-40.
- Chandler, Ralph.C. dan Plano, Jack.C. 1982. *The Public Administration Dictionary*. New York, Chichester, Brisbane : John Wiley & Sons.
- Day, Patricia dan Rudolf Klein. 1987. *Accountabilities: Five Public Services*. London. Tavistock Publication.
- Denhardt, Robert B. 1999. *Public Administration : An Action Orientation*. 3 rd ed., Fort worth. TX: harcourt Brace.
- Dubnick, Melvin J. 2003. *Accountability in the Promise of Performance: In Search of The Mechanisms*. Annual Meeting of the American Political Science Association. August 28-31. Philadelphia.
- _____. 2005. Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms. *Public Performance and Management Review*, 28 (3), 376-417.
- Dwiyanto, Agus.dkk. 2007. *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. PSKK-UGM.
- Dwivedi, O.P and Michael Jabra. 1988. Introduction: Public Service Responsibility and Accountability. Dalam *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Dwivedi and Jabra (ed). West Hartford, CT: Kumarian Press:1-6.
- ErkkilÃ Tero. 2007. "Governance And Accountability - A Shift In Conceptualisation.1." *Public Administration Quarterly*. Southern Public Administration Education Foundation.. Retrieved April 21, 2009 from *HighBeam Research*: <http://www.highbeam.com/doc/1P3-1268539321.html>
- Ferlie, E. et al. 1996. *The New Public Management In Action*. Oxford. Oxford University Press.
- Finer, Herman. 1941. Administrative Responsibility and Democratic Government. *Public Administration Review* 1(Summer): 335-50.
- Friedrich, Carl J. 1940. Public Policy and the Nature of Administrative Responsibility. In *Public Policy*, edited by Carl J.Friedrich and Edward S. Mason. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- 1 _____ . 1972. *The Pathology of Politics*. New York: Harper and Row.
- Harlow, C. 2002. *Accountability in the European Union*. Oxford University Press: Oxford.
- Hood, C. & Schuppert, G. 1988. *Evaluation and Review. In Delivering Public Services in Western Europe. Sharing Western European Experience of Para-Government Organization*; Hood, C. & Schuppert, G., Eds.; Sage Publications: London.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Mulgan, R. 2000. "Accountability": an ever-expanding concept?; *Public Administration*, 78 (3) 555-573.
- Philip, Mark. 2000. *Access, Accountability and Authority: Corruption and the democratic process*. Paper for the political studies Association-UK 50th Annual conference. London.
- 1 Pierre, J. & Peters, G.B. 2000. *Governance, Politics and the State*; St. Martin's Press: New York.
- Romzek, Barbara S. Dan Dubnick, Melvin J. 1987. Accountability in the public sector: Lessons from the challenger tragedy. *Public Administration Review*. 47 (3):227-238.
- Shafritz, Jay dan Albert Hyde. 1997. *Classics of Public Administration*. 2nd ed. Ford Worth, TX: Harcourt Brace.
- 1 Sinclair, A. 1995. The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses. *Accounting Organizations and Society*, 20 (2), 219-237.
- 4 <https://yappika-actionaid.or.id/potret-besar-buruknya-pelayanan-publik-di-indonesia/>

Model Sistem Responsibilitas Dan Akuntabilitas "Gapura Kota Model"

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	faculty.cbpp.uaa.alaska.edu Internet Source	5%
2	journal.unair.ac.id Internet Source	5%
3	investor.id Internet Source	4%
4	yappika.or.id Internet Source	3%
5	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%